

Judul : Rencana pemerintah menaikkan HET MinyakKita menuai polemik
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Rencana Pemerintah Menaikkan HET MinyakKita Menuai Polemik

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyakKita. Saat ini, HET MinyakKita sebesar Rp15.700 per liter untuk konsumen akhir.

Meskipun pembahasan antarkementerian/lembaga (K/L) telah mengucur pada kesempatan untuk menaikkan HET, besaran kenaikan maupun waktu pemberlakukannya hingga kini belum ditetapkan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan, akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menyiapkan rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyakKita.

"Nanti, aku baru pulang dari Tanah Suci (melaksanakan ibadah haji). Nanti akan koordinasi dengan Pak Mendag, aku lapor Pak Menko," kata Mentan

Amran ditemui usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Ujraja Stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, besar kecilnya kenaikan HET masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Saat ini, harga CPO masih berfluktuasi. Bahkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sempat mengalami penurunan tajam seiring pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Bersama komoditas batu bara dan paduan besi, ekspor kelapa sawit nantinya akan dikendalikan melalui DSI.

Pemerintah memilih menunggu hingga harga bahan baku minyak goreng lebih stabil sebelum menetapkan kebijakan baru. Namun, sulit memastikan kapan harga CPO

akan benar-benar stabil. Fluktuasi harga CPO dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan global. Ketidakeimbangan pasokan dari negara produsen utama, yakni Indonesia dan Malaysia, serta perubahan permintaan dunia secara langsung memengaruhi pergerakan harga.

Selain itu, harga CPO juga dipengaruhi harga minyak nabati lain yang menjadi substitusi, seperti minyak kedelai, bunga matahari, dan kanola. Ketika harga minyak substitusi turun, permintaan terhadap CPO biasanya ikut melemah sehingga menekan harga.

Sebaliknya, jika harga minyak substitusi naik, harga CPO cenderung terdorong kenaikan harga.

Faktor lain yang memengaruhi harga CPO adalah kebijakan Pemerintah. Sebelum program mandatori biodiesel diberlakukan, kebutuhan domestik

terhadap CPO relatif terbatas. Namun setelah diterapkannya program B40, yakni campuran 40 persen biodiesel berbahan minyak sawit dan 60 persen solar fosil, kebutuhan CPO dalam negeri meningkat signifikan. Selain itu, kebijakan ekspor, pajak ekspor, pungutan ekspor, serta kewajiban pasok pasar domestik (Domestic Market Obligation (DMO)) juga berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga CPO.

Iklim dan gangguan tanaman turut menjadi faktor penting. Fenomena El Nino maupun La Nina dapat memengaruhi produktivitas perkebunan sawit. Penurunan produksi akibat cuaca ekstrem kerap memicu kelangkaan pasokan dan mendorong kenaikan harga. Di samping itu, rendahnya peremajaan kebun sawit rakyat serta serangan penyakit Ganoderma yang dikenal sebagai salah satu penyakit paling mematikan pada

tanaman sawit juga berkontribusi terhadap fluktuasi pasokan.

Dengan berbagai faktor tersebut, sulit memastikan kapan harga CPO akan stabil.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta Pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan HET MinyakKita. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membebani masyarakat dan menekan daya beli.

Sementara itu, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyoroti aspek tata kelola distribusi MinyakKita. Ia menilai pengawasan terhadap penyaluran MinyakKita harus diperkuat agar program subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Herman Khaeron dan Khudori terkait wacana kenaikan HET MinyakKita.

KHUDORI, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) | HERMAN KHAERON, Anggota Komisi VI DPR RI

Tata Kelola Harus Diperbaiki Berpotensi Beban Kehidupan Rakyat



“Jika itu yang menjadi tujuan utama, Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pemberian subsidi langsung kepada kelompok sasaran, misalnya melalui transfer tunai. Dengan catatan, data penerima harus valid dan akurat.”



“Tentu akan berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan lainnya. Efek berantainya atau multiplier effect cukup besar, karena MinyakKita banyak digunakan oleh masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).”

Pemerintah berencana menaikkan HET MinyakKita. Apa pandangan Anda?
Pertanyannya, jika HET MinyakKita dinaikkan, apakah harga di pasar otomatis akan sesuai dengan kelenturan? Belum tentu.

Memang HET MinyakKita sebesar Rp15.700 per liter yang sudah berlaku hampir dua tahun hingga kini belum bisa dipenuhi di lapangan? Jawaban atas pertanyaan ini patut menjadi bahan refleksi.

Menurut saya, persoalan ini tampaknya bukan semata masalah teknis, melainkan ada problem struktural yang menjadi akar penyebabnya.

Apa penyebabnya menurut Anda?
Pertama, struktur ongkos produksi MinyakKita kurang realistis.

Maksudnya?
Menyajak Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024,

produsen wajib menjual MinyakKita kepada Distributor Lini 1 (D1) dengan harga maksimal Rp13.500 per liter. Selanjutnya, D1 menjual kepada Distributor Lini 2 (D2) maksimal Rp14.000 per liter. D2 menjual kepada pengecer maksimal Rp14.500 per liter, dan pengecer menjual kepada konsumen akhir sesuai HET Rp15.700 per liter.

Dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya pengolahan, kemasan, dan distribusi, harga maksimal bahan baku berupa crude palm oil (CPO) seharusnya tidak melebihi Rp10.000 per kilogram. Jika harga CPO berada di atas level tersebut, produsen MinyakKita berpotensi merugi.

Apa alasan lainnya?
Kedua, pembatasan distribusi hanya sampai lini 2 sulit diterapkan dalam kondisi geografis Indonesia. Membatasi distribusi hanya sampai Distributor Lini 2 di negara seluas Indonesia dengan kondisi wilayah yang

sangat beragam merupakan sesuatu yang ideal di atas kertas, tetapi sulit dieksekusi di lapangan.

Hai ini terkonfirmasi dari teman Kementerian Perdagangan bahwa distribusi MinyakKita dalam praktiknya dapat melampaui hingga D3 dan D4, yang kemudian berkontribusi pada harga jual di atas HET.

Apa faktor berikutnya?
Ketiga, kebijakan MinyakKita menyalurkan pendekatan yang sebelumnya terbukti kurang efektif. Kebijakan ini pada dasarnya mengulangi skema yang digunakan untuk mengatasi gejolak minyak goreng pada periode 2021-2022. Dari 21 regulasi yang diterbitkan saat itu, sebagian besar berujung pada tiga instrumen utama, yaitu HET minyak goreng, kewajiban penanaman kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation (DMO)), dan kewajiban harga penanaman domestik (*Domestic Price Obligation (DPO)*). ■ **REN**

Bagaimana pandangan Anda terkait wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyakKita?
Menurut saya, HET MinyakKita sebaiknya tetap dipertahankan dan tetap disubsidi.

Kan harga di luar negeri naik? Memang harga minyak sawit di pasar internasional saat ini mengalami kenaikan hingga sekitar 1.600 dolar AS per metrik ton. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, harga MinyakKita yang berlaku saat ini sebaiknya tidak dinaikkan.

MinyakKita merupakan produk yang dipertanyakan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menjadi bagian dari pengasapan negara kepada BUMN dalam proses distribusinya. Oleh karena itu, penyalurannya harus tetap dijaga.

Yang paling penting adalah memastikan tidak terjadi kebocoran

dalam distribusi. Jangan sampai produk bersubsidi ini dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

Artinya, kenaikan HET MinyakKita tidak diperlukan? Saya kira dalam situasi ekonomi saat ini belum perlu dilakukan kenaikan HET. MinyakKita harus tetap mendapatkan subsidi dari negara. Apalagi subsidi tersebut didukung oleh dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dana itu berasal dari pungutan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Setiap ekspor CPO dikenakan pungutan, dan dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program subsidi MinyakKita. Jadi ketika harga CPO naik, pendapatan dari pungutan juga meningkat. Dengan demikian, dukungan terhadap subsidi MinyakKita seharusnya tetap bisa dipertahankan

untuk menjaga daya beli masyarakat.

Jika HET MinyakKita naik, misalnya menjadi Rp15.700 per liter, apa dampaknya? Tentu akan berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan lainnya. Efek berantainya atau multiplier effect cukup besar karena MinyakKita banyak digunakan oleh masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketika harga minyak goreng naik, biaya produksi dan harga jual berbagai produk makanan juga berpotensi meningkat. Karena itu, kebijakan mempertahankan harga MinyakKita perlu dipandang sebagai bentuk afirmasi politik ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

Tujuannya adalah memastikan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, tetap terlindungi di tengah kondisi ekonomi yang masih merentan. ■ **REN**